

Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Andi Muhammad Nurul Afdhal¹, Asmi Rahayu²

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Soppeng

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Soppeng. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan saintific. Populasi adalah pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng yang berjumlah 19 Dinas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan dalam penelitian ini adalah kepala penatausahaan, bendahara keuangan dan staf akuntansi yaitu karena kepala penata usahaan, bedahara keuangan dan staf akuntansi bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan bagian tersebut merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Jadi total sampel penelitian ini adalah 57 pegawai pada OPD Kabupaten Soppeng. Teknik statistik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 23 digunakan untuk mengolah data penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Kata kunci: Sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas kinerja

Abstract

This study aims to determine the effect of public sector management control systems, reporting systems and clarity of budget targets on performance accountability in the Soppeng Regency Regional Apparatus Organization. This research approach uses a scientific approach. The population consists of 19 employees of the Soppeng Regency Regional Apparatus Organization. Sampling in this study using purposive sampling technique with the consideration in this study is the head of administration, treasurers of finance and accounting staff, namely because the head of administration, financial advisors and accounting staff are responsible for regional financial management and this section is an important element in realizing performance accountability. Government agencies. So the total sample of this study was 57 employees at OPD Soppeng Regency. Multiple linear regression statistical techniques with the help of SPSS 23 were used to process research data. The results of the study found that the public sector management control system, reporting system and clarity of budget targets had a positive and significant effect on performance accountability in the Soppeng Regency Regional Apparatus Organization.

Keywords: public sector management control systems, reporting systems, clarity of budget targets , performance accountability

✉ Corresponding author :

Email Address : andafdhal@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan digital memberikan ruang kepada publik untuk melihat pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui website-website resmi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga sektor publik lebih memperhatikan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu akuntabilitas kepada masyarakat luas, bukan hanya akuntabilitas vertical (*vertical accountability*), yaitu akuntabilitas pengelolaan dana dari departemen yang lebih tinggi. (Mardiasmo, 2010). Berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2017 berada pada kategori CC atau setara dengan skor 55,34. Kemudian pada tahun 2018 masih termasuk dalam kategori CC, dan nilainya meningkat menjadi 58,23. Masih lemahnya proses administrasi yang perlu diperhatikan yaitu dokumen perencanaan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), karena nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas-dinas akan menentukan skor SAKIP kabupaten keseluruhan.

Berkaitan praktek pelaporan pertanggungjawaban dalam organisasi sektor publik baik pertanggungjawaban keuangan maupun non keuangan merupakan landasan teori keagenan (Amin & Anwar, 2020b). Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja, pemerintah berlaku sebagai agen memegang beban menyediakan keterangan yang berguna bagi pengguna keterangan keuangan dan non keuangan sedangkan masyarakat yang diwakili oleh DPRD bertindak sebagai prinsipal yang menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan laporan pertanggungjawaban OPD. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang berwenang, secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilannya, untuk memberikan keterangan yang berguna bagi organisasi dan pengguna informasi keuangan pemerintah. Kontrol manajemen dalam organisasi sektor publik mampu menunjang hasil sesuai yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah. Dalam hubungan keagenan, pemerintah yang bertindak sebagai agen harus menggunakan sistem pelaporan dan anggaran yang jelas, serta mengambil kepentingan pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai direktur.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengendalian sebagai bagian dari pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan ketenagakerjaan di organisasi sektor publik. Kontrol manajemen dalam organisasi sektor publik dapat membantu mempercepat penyampaian hasil yang benar yang diharapkan oleh pemerintah. Sejumlah kegiatan perlu dilaksanakan dalam pengelolaan dan pengendalian sektor publik, termasuk perencanaan, sistem pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2010).

Sistem pengendalian manajemen memainkan peran yang sangat penting, dalam menyajikan instrumen yang membuat agar perusahaan/organisasi tetap bertahan dalam ketidakpastian lingkungan (Anthony et al., 2007). Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen juga dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk kelompok kerja di semua tingkatan. Pemberdayaan mengacu pada pemberdayaan dan tanggung jawab

organisasi tingkat bawah, sehingga manajer tingkat bawah memiliki keberanian dan ide untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan organisasi, khususnya di sektor publik, perlu diterapkan kebijakan yang efektif dan efisien, yang dapat dicapai melalui sistem pengendalian manajemen (Rahmat et al., 2019).

(Paramitha & Gayatri, 2016) menyatakan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem dan komunikasi yang benar tentunya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja di institusi pemerintahan daerah. (Pratiwi & Amanah, 2019) dan (Rininda & Erina Sudaryati, 2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Sistem dan komunikasi yang benar tentunya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja di institusi pemerintahan daerah (Paramitha & Gayatri, 2016).

Sisi lain dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang ditetapkan. Laporan yang baik yakni laporan yang disusun secara jujur, obyektif dan transparan (BPKP, 2000).

(Yulianti, Hardi, & Rusli, 2014) mengemukakan sistem pelaporan mencerminkan kewajiban untuk menekan dan melaporkan kinerja semua kegiatan dan sumber daya yang harus dijelaskan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengontrol kinerja manajemen selama pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan (Mikoshi, 2020). Akuntansi dan laporan keuangan mencakup pengertian sebagai proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan sebagai alat akuntabilitas kinerja organisasi.

Kemudian (Pratama et al., 2019) menemukan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. (Kartika & Sukanto, 2019) dan (Aprilianti et al., 2020) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat memantau dan mengontrol kinerja manajemen dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan.

Kejelasan tujuan anggaran dapat dijadikan sebagai salah satu aspek untuk mengukur apakah kinerja pemerintah daerah telah tercapai. Selama periode anggaran, semua manajer organisasi yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyusun anggaran harus dapat memahami dan menjelaskan tujuan anggaran yang telah ditetapkan dan disusun secara jelas dan spesifik (Amin & Anwar, 2020a). Hasil penelitian (Yulianto & Muthaher, 2019) dan (Manullang & Abdullah, 2019) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. Keseluruhan karakteristik tujuan anggaran memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kinerja pemerintah dalam perencanaan anggaran, sehingga memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja. (Mulyadi & Dedy, 2018).

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Hipotesis penelitian

H1 : sistem pengendalian manajemen sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah

H2 : sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

H3 : kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah

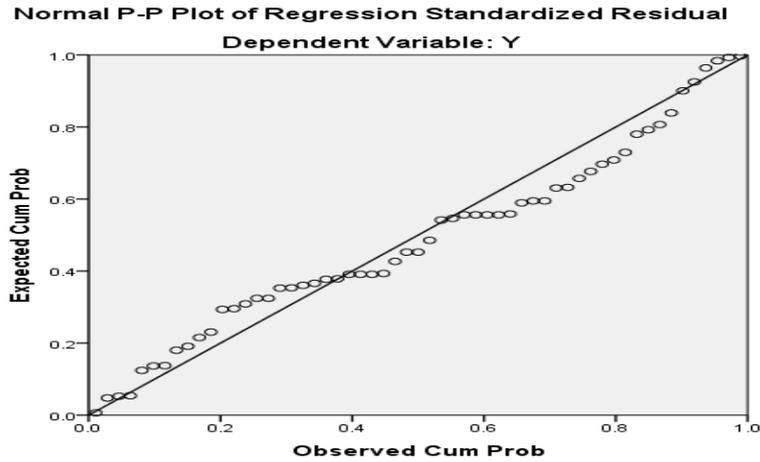
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu pengumpulan data dari hasil penyebaran kuesioner pada sampel penelitian ini. Populasi adalah pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng yang berjumlah 19 Dinas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan dalam penelitian ini adalah kepala penatausahaan, bendahara keuangan dan staf akuntansi yaitu karena kepala penata usahaan, bedahara keuangan dan staf akuntansi bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan bagian tersebut merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Jadi total sampel penelitian ini adalah 57 pegawai pada OPD Kabupaten Soppeng. Data dianalisis statistic dengan bantuan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

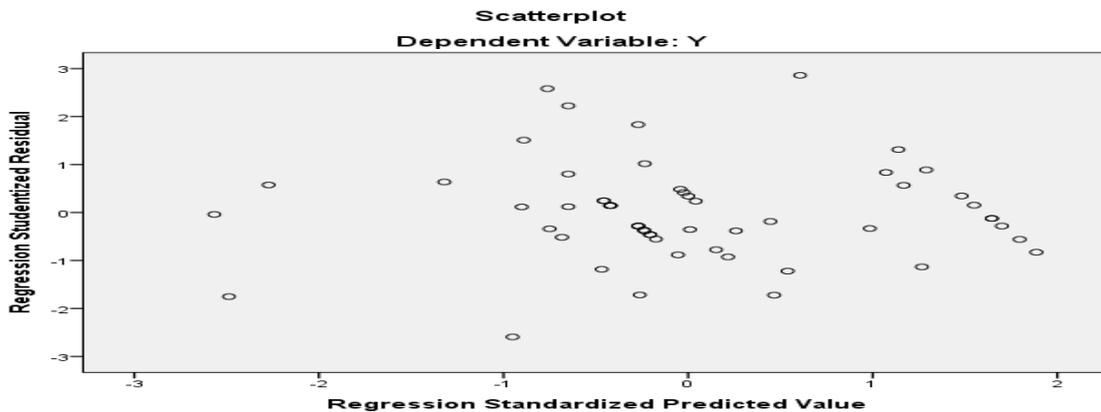
Hasil uji normal probability plot menemukan data penelitian dapat digunakan, yaitu dapat dikatakan normal, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
 Sumber : Data Diolah SPSS V. 23.00 (2021)

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode uji Grafik menunjukkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar secara acak, seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber : Data Diolah SPSS V. 23.00 (2021)

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik (X1)	,755	1,325
Sistem Pelaporan (X2)	,530	1,887

Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	,479	2,087
a. Dependent Variable: Y		
Sumber : Data diolah, SPSSV.23 (2021)		

Dapat dilihat dari hasil uji multikolinearitas data sebelumnya bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini dapat ditoleransi, dan keberadaannya tidak mengganggu model.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Adjusted R Square	Koefisien Determinasi Berganda	Keterangan
0.884	88,40%	Pengaruh Variabel X terhadap Y sebesar 88,40%

Sumber : Data diolah SPSS V.23.00 (2021)

Nilai Adjusted R square yang diperoleh adalah 0,884 atau 88,40%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model terbatas menjelaskan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran sebesar 88,40%, dan ini berarti bahwa 11,60% akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.393	3	4.798	143.304	.000 ^b
Residual	1.774	53	.033		
Total	16.167	56			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1, X2,X3

Sumber : Data diolah SPSS V.23.00 (2021)

Dari tabel di atas, jika membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat kesalahan, 5% dan *degree of freedom* (df_1) = 3 dan (df_2) = 2,780, dan F tabel adalah 2,780. Nilai F hitung sebesar 143,304 > Nilai F tabel sebesar 2,780 yang artinya dalam penelitian ini kejelasan sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pelaporan dan target anggaran secara simultan (bersamaan) berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-.518	.249	-2.077	.043
Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik (X1)	.286	.062	4.606	.000
Sistem Pelaporan (X2)	.218	.061	3.606	.001
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	.637	.067	9.577	.000

Sumber : Data diolah SPSS V.23.00 (2021)

Tabel di atas menemukan bahwa :

1. Pengaruh sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Pada tabel di atas menunjukkan hasil analisis regresi variabel sistem pengendalian manajemen sektor publik (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar 4,606. Nilai koefisien regresi pada tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini diperkuat dengan nilai t hitung 4,606 > t tabel 1,661. Hasil ini mempunyai arti bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, maka Hipotesis terdukung.
2. Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Pada tabel di atas menunjukkan hasil analisis regresi variabel sistem pelaporan (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar 3,606. Nilai koefisien regresi pada tingkat signifikansi 0,001. Hasil ini diperkuat dengan nilai t hitung 3,606 > t tabel 1,661. Hasil ini mempunyai arti bahwa sistem pelaporan (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, maka Hipotesis terdukung.
3. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Pada tabel di atas menunjukkan hasil analisis regresi variabel kejelasan sasaran anggaran (X3) mempunyai nilai t hitung sebesar 9,577. Nilai koefisien regresi pada tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini diperkuat dengan nilai t hitung 9,577 > t tabel

1,661. Hasil ini mempunyai arti bahwa kejelasan sasaran anggaran (X3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, maka Hipotesis terdukung.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh model atau persamaan sebagai berikut:

$$\text{Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah} = -0,518 + 0,286X_1 + 0,218X_2 + 0,637X_3 + e$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien variabel sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah sebesar 0,286 yang merupakan arah positif yaitu jika sistem pengendalian manajemen sektor public meningkat, maka akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah akan meningkat sebesar 0,286.
2. Koefisien variabel system pelaporan adalah sebesar 0,218 yang merupakan arah positif yang berarti bahwa jika sistem pelaporan meningkat, maka akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah akan meningkat sebesar 0,218.
3. Koefisien variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 0,637 yang merupakan arah positif yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan kejelasan sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah akan meningkat sebesar 0,637.

Pembahasan

Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Adanya sistem pengendalian manajemen sektor publik yang baik akan memengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung interpretasi teori keagenan atas laporan pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang berwenang, secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilannya, untuk memberikan keterangan yang berguna bagi organisasi dan pengguna informasi keuangan pemerintah. Kontrol manajemen dalam organisasi sektor publik dapat membantu mempercepat penyampaian hasil yang benar yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam hubungan keagenan, pemerintah yang bertindak sebagai agen harus menggunakan sistem pelaporan dan anggaran yang jelas, serta mengambil kepentingan pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian (Pratama et al., 2019), (Pratiwi & Amanah, 2019) dan (Rininda & Erina Sudaryati, 2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Sistem dan komunikasi yang benar tentunya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja di institusi pemerintahan daerah (Paramitha & Gayatri, 2016).

Hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sistem pelaporan maka akuntabilitas kinerja OPD juga akan semakin baik.

Hasil penelitian ini mendukung interpretasi teori keagenan atas laporan pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang berwenang, secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilannya, untuk memberikan informasi yang berguna bagi organisasi dan pengguna informasi keuangan pemerintah. Pengendalian manajemen dalam organisasi sektor publik dapat membantu mempercepat hasil yang tepat di mana pemerintah menginginkannya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah yang bertindak sebagai agen harus menggunakan sistem pelaporan dan anggaran yang jelas, serta mengambil kepentingan pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal.

Hasil penelitian ini mendukung hasil (Kartika & Sukamto, 2019), (Aprilianti et al., 2020) dan (Zatira, 2021) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat memantau dan mengontrol kinerja manajemen dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil analisis dapat diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Makin jelas penyusunan anggaran maka akan memengaruhi akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung interpretasi teori keagenan atas laporan pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang berwenang, secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilannya, untuk memberikan informasi yang berguna bagi organisasi dan pengguna informasi keuangan pemerintah. Pengendalian manajemen dalam organisasi sektor publik dapat membantu mempercepat hasil yang tepat di mana pemerintah menginginkannya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah yang bertindak sebagai agen harus menggunakan sistem pelaporan dan anggaran yang jelas, serta mengambil kepentingan pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal.

Hasil penelitian (Primayoni et al., 2014), (Zulfiandri, 2017) dan (Wardani & Silvia, 2021) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Keseluruhan karakteristik tujuan anggaran memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kinerja pemerintah dalam perencanaan anggaran, sehingga memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja. (Mulyadi & Dedy, 2018).

SIMPULAN

Simpulan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Referensi :

- Amin, A., & Anwar. (2020a). LOCUS OF CONTROL SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 4(1), 151-156.
- Amin, A., & Anwar, A. (2020b). DIMENSI KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 223-230.
- Anthony, R. N., Govindarajan, V., & Dearden, J. (2007). *Management control systems* (Vol. 12). McGraw-Hill Boston.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150-159.
- BPKP, L. A. N. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*.
- Kartika, R. D., & Sukamto, S. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris pada Dinas Daerah Kota Surabaya). *Liability*, 1(2), 63-83.
- Manullang, S. B., & Abdullah, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 62-73.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192-199.
- Mulyadi, A. R., & Dedy, E. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 95-101.
- Paramitha, I. A. M. D., & Gayatri. (2016). PENGARUH KETEPATAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN MANAJERIAL SEKTOR PUBLIK DAN SISTEM PELAPORAN PADA AKUNTABILITAS KINERJA. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2457-2479.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429-444.
- Pratiwi, E. P., & Amanah, L. (2019). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Kualitas Sdm, Dan Pengendalian Manajerial Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(3).

- Primayoni, N. K. R., Adiputra, I. M. P., SE, S. H., & Edy Sujana, S. E. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Rahmat, A., Jasmadeti, J., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Peningkatan Performa Proses Kerja Dan Piutang Usaha Pada Perusahaan Pt. Astra International, Tbk-Tso (Studi Kasus Pada Pt Astra International Tbk-Tso Auto2000 Cab. Bogor). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(1), 179-187.
- Rininda, B. P., & Erina Sudaryati. (2020). Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1099-1113.
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI LAMPUNG. *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 6(1).
- Yulianto, A. R., & Muthaher, O. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 204-219.
- Zatira, S. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pada Pemerintah Kota Medan. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Zulfiandri, A. (2017). Faktor-Faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada OPD di Pemerintah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 2(1), 102-125.